



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

RANCANGAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2022



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 174);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.
2. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berfungsi sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan Perangkat Daerah, yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam hal pencantuman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menetri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka nomenklatur, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kodefikasi perangkat daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan dimungkinkan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026;

- 10) Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi Legal;
- 11) Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pasar;
- 12) Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 13) Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

- 1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2. Tujuan

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2023;
- 2) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan keterkaitan antara Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 dan Capaian Renstra di Tahun 2021

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 dan pencapaian target Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 di tahun pertama (2021).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Utama.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN dan SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berisikan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai tahun berkenaan. Tujuan dan Sasaran dilengkapi dengan indikator tujuan dan indikator sasaran beserta target tahun 2023.

3.2. Usulan Inovasi Perangkat Daerah

Berisikan usulan output inovasi Perangkat Daerah yang akan dilakukan pada tahun 2023, yang dilengkapi sesuai format yang ditetapkan

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan tabel rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2021, predikat kinerja program masuk kategori sangat tinggi (100%)

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel Form E.81 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sebagaimana pada table 2.1. berikut:

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten
RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2021

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)			Ket
							DPA		Renja	I	II	III	IV	DPA		Renja							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)		K	Rp(000)	K	
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%			18
2.6		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja Dokumen RFK Dokumen LKJIP/LAKIP Dokumen Laporan Tahunan			1 dokumen	18.894,64	30.110,00	7,00%	1.725,00	12,00%	3.765,00	51,00%	3.733,88	30,00%	9.175,80	100,00%	18.399,68	100,00%	98,42%	61,11%	
2.7		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS			12 bulan	15.715.411,24	16.027.579,46	19,00%	2.921.072,78	32,00%	4.881.052,74	22,00%	3.501.738,79	27,00%	3.898.208,39	100,00%	15.200.072,68	100,00%	96,72%	94,84%	
2.8		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang			12 bulan	439.370,40		17,00%	70.601,13	33,00%	138.519,93	23,00%	105.472,43	27,00%	109.779,33	100,00%	424.373,00	100,00%	96,59%		
2.9		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.02.06	PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	Laporan Keuangan Audited			2 Dokumen	1.161,96				5,00%		37,00%	600,00	58,00%	512,10	100,00%	1.112,10	100,00%	95,71%		
2.10		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	Laporan Keuangan semesteran LPJ Pengeluaran LPJ Penerimaan Laporan Keuangan Laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD Laporan Aset / BMN semesteran			2 dokumen	9.872,78	47.071,68	8,00%	900,00	37,00%	4.092,90	7,00%		48,00%	4.462,35	100,00%	9.455,25	100,00%	95,77%	20,09%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)			Ket
					DPA			Renja	I		II		III		IV		DPA		Renja			
					K	Rp		K	Rp	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)		K	Rp(000)	K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=(13/8)*100%	15								
2.11		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.05.03	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi			1 dokumen	3.002.130,96		21,00%	528.206,98	26,00%	686.747,09	29,00%	679.262,35	24,00%	674.831,75	100,00%	2.569.048,18	100,00%	85,57%	
				Layanan administrasi kepegawain			12 bulan															
				Pembayaran tenaga non PNS /PHL			12 bulan															
2.12		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Penyediaan alat listrik			19 jenis	22.620,63	22.626,40	29,00%	6.265,14	1,00%		57,00%	13.055,49	13,00%	3.300,00	100,00%	22.620,63	100,00%	100,00%	99,97%
2.13		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	ATK			2 paket	161.314,93	165.479,00	2,00%	1.800,00	2,00%	4.935,00	50,00%	125.539,93	46,00%	27.490,00	100,00%	159.764,93	100,00%	99,04%	96,55%
				Penyediaan makanan dan minuman rapat			12 bulan															
2.14		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGGARAN	layanan cetak dan panggandaan dokumen			12 bulan	33.887,70	37.850,50		5,00%	911,25	84,00%	28.653,08	11,00%	3.766,50	100,00%	33.330,83	100,00%	98,36%	88,06%	
2.15		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Penyediaan makanan dan minuman tamu			12 bulan	25.500,00	118.000,00	9,00%	1.875,00	21,00%	5.625,00	13,00%	2.550,00	57,00%	14.850,00	100,00%	24.900,00	100,00%	97,65%	21,10%
2.16		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Layanan perjalanan dinas dalam daerah			12 bulan	70.358,00	128.720,00	1,00%		13,00%	15.310,69	4,00%		82,00%	53.657,69	100,00%	68.968,38	100,00%	98,02%	53,58%
				Layanan perjalanan dinas luar daerah			12 bulan															
2.17		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.06.10	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	pengelolaan arsip dan perpustakaan			12 bulan	26.451,77		1,00%		38,00%	10.817,86	9,00%	2.706,80	52,00%	8.345,40	100,00%	21.870,06	100,00%	82,68%	
2.18		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.06.11	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	Pengelolaan informasi dan dokumen PD			12 bulan	9.119,15		1,00%	150,00	17,00%	1.630,00	42,00%	4.263,00	40,00%	2.619,95	100,00%	8.662,95	100,00%	95,00%	
				Pengelolaan website			12 bulan															
2.19		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	layanan surat menyurat			12 bulan	26.699,25	56.618,00	11,00%	2.570,00	11,00%	3.020,00	37,00%	9.527,20	41,00%	8.906,20	100,00%	24.023,40	100,00%	89,98%	42,43%
2.20		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	pembayaran jasa langganan			12 bulan	932.100,00	1.152.000,00	18,00%	206.927,94	21,00%	215.858,89	18,00%	199.203,94	43,00%	275.289,19	100,00%	897.279,95	100,00%	96,26%	77,89%
2.21		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			12 bulan	133.150,00	137.125,00	19,00%	23.930,86	12,00%	13.681,00	20,00%	27.131,50	49,00%	66.713,70	100,00%	131.457,06	100,00%	98,73%	95,87%
2.22		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor			12 bulan	3.625.316,21	3.800.222,60	21,00%	784.893,45	25,00%	895.117,84	24,00%	859.061,01	30,00%	907.159,51	100,00%	3.446.231,81	100,00%	95,06%	90,68%
2.23		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Layanan pemeliharaan kendaraan dinas			12 bulan	588.264,00	678.708,00	15,00%	94.047,58	21,00%	113.685,77	18,00%	105.841,64	46,00%	178.481,52	100,00%	492.056,52	100,00%	83,65%	72,71%
				Layanan penyediaan BBM kendaraan			12 bulan															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)			Ket		
							DPA		Renja	I		II		III		IV			DPA		Renja			
							K	Rp	K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)		K	Rp(000)	K		Rp(000)	K
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%			15	
2.24		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.09.05	PEMELIHARAAN MEBEL	Layanan pemeliharaan mebel			12 bulan		Rp(000)	Rp(000)			5,00%		500,00	2,00%		93,00%	20.000,00	100,00%	20.500,00	100,00%	100,00%	100,00%
2.25		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.01.2.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan taman			2 unit 2 unit	110.613,20	110.613,20	5,00%	4.050,00	10,00%	10.180,00	49,00%	53.605,85	36,00%	32.685,00	100,00%	100.521,85	100,00%	90,88%	90,88%		
2.26		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.02.2.01.01	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERSELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Pencapaian target PAD pemungutan retribusi secara on line Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi Pelayanan Perijinan SITU			100% 9 pasar 63 orang 2400 SITU	129.375,19	158.645,18	11,00%	16.385,03	54,00%	63.119,09	8,00%	7.725,53	27,00%	41.894,18	100,00%	129.123,81	100,00%	99,81%	81,39%		
2.27		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.02.2.02.01	FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	TDG yang dimonitor Ijin usaha perdagangan yang dimonitor Toko Modern yang diterbitkan Distribusi Minuman beralkohol yang dimonitor			20 TDG 60 ijin SIUP 15 toko 15 ijin	71.219,80	63.720,00	7,00%	3.300,00	44,00%	17.850,00	5,00%	900,00	44,00%	49.169,75	100,00%	71.219,75	100,00%	100,00%	111,77%		
2.28		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.02.2.06.03	PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA TERHADAP PENGGUNA AKHIR BAHAN BERBAHAYA (PA-B2) MAUPUN PRODUSEN B2 (P-B2)	Laporan monitoring pengawasan pangan dan bahan berbahaya Lokasi pengawasan pangan dan bahan berbahaya Lokasi pengawasan pangan dan bahan berbahaya Sosialisasi bahan berbahaya			1 dokumen 27 pasar 2 lokasi PKL 3 pasar	84.118,45	96.355,00	1,00%		64,00%	53.053,50	15,00%	11.340,00	20,00%	19.614,95	100,00%	84.008,45	100,00%	99,87%	87,19%		
2.29		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.03.2.01.01	PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Bangunan pasar terpelihara baik Kajian Lingkungan dan ANDAL Lain Laporan monitoring dan evaluasi serpras pasar rakyat Pendampingan revitalisasi pasar (APBN/TP)			31 pasar 2 paket 1 dokumen 2 pasar	5.435.748,40	2.964.441,00	1,00%	19.205,50	13,50%	175.405,43	35,50%	1.111.519,00	50,00%	3.608.534,98	100,00%	4.914.664,90	100,00%	90,41%	165,79%		

[illegible]

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)			Ket
					K	Rp	K	Rp				DPA	Renja	I	II	III	IV	DPA	Renja						
									1	2	3									4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=(13/8)* 100%	15	16	17									
2.33		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.04.2.02.01	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	Laporan Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Monitoring barang rusak dan kadaluarsa Monitoring gas bersubsidi Peserta Kegiatan Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal			1 dokumen 30 toko 17 Kecamatan 60 orang	14.562,00	75.750,00			11,00%	5.985,00	2,00%		87,00%	8.547,00	100,00%	14.532,00	100,00%	99,79%	19,18%			
2.34		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.04.2.02.02	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	Laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			12 dokumen	141.603,50	148.555,00	1,00%	1.200,00	29,00%	31.220,00	40,00%	49.450,00	30,00%	54.988,10	100,00%	136.858,10	100,00%	96,65%	92,13%			
2.35		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.04.2.03.03	PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPIK DAN PESTISIDA BERSUBSIDSI	Monitoring pupuk bersubsidi			17 Kecamatan	7.204,90	15.445,00			73,00%	5.420,00	1,00%		26,00%	1.764,90	100,00%	7.184,90	100,00%	99,72%	46,52%			
2.36		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.05.2.01.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PRODUK EKSPOR UNGGULAN KABUPATEN/KOTA	Laporan realisasi ekspor impor			1 dokumen	10.159,60	12.085,00			25,00%	2.700,00	20,00%	2.103,25	55,00%	5.355,90	100,00%	10.159,15	100,00%	100,00%	84,06%			
2.37		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.05.2.01.02	PAMERAN DAGANG NASIONAL	Kekutsertaan dalam Pameran IFEX Pameran Virtual - -			1 Kali 1 kali - -	273.941,75	144.731,00			15,00%	47.420,00	15,00%	21.570,00	70,00%	199.076,75	100,00%	268.066,75	100,00%	97,86%	185,22%			
2.38		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.05.2.01.05	PENINGKATAN CITRA PRODUK EKSPOR	Laporan IMA Chapter Sleman			1 dokumen	103.083,11	118.478,50			40,00%	46.920,00	20,00%	17.517,93	40,00%	38.645,19	100,00%	103.083,11	100,00%	100,00%	87,01%			
2.39		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.05.2.01.06	PEMBINAAN PELAKU USAHA EKSPOR	Fasilitasi paguyuban eksportir -			1 paguyuban -	49.800,00	75.750,00			6,00%	1.350,00	49,00%	7.150,00	45,00%	41.300,00	100,00%	49.800,00	100,00%	100,00%	65,74%			
2.40		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.07.2.01.01	PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Kajian omzet pasar Kajian pengembangan pasar rakyat Pemasaran pasar-pasar tradisional Pengelolaan radio pasar Promosi pasar dimeia massa Undian belanja berhadiah di pasar Undian belanja berhadiah di pasar			1 Omzet 1 Dokumen 12 Bulan 2 Pasar 5 Kali 1 kali pengundian 22 Pasar	609.965,87	711.158,93	13,00%	82.157,68	19,00%	104.127,42	26,00%	149.315,63	42,00%	263.431,40	100,00%	599.032,12	100,00%	98,21%	84,23%			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

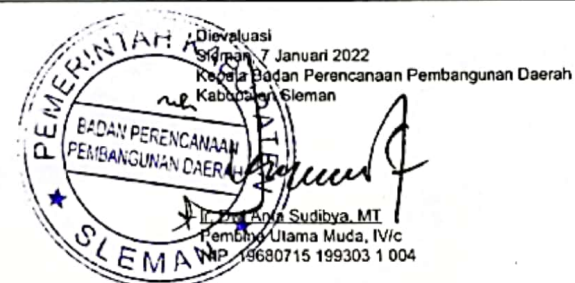
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)			Ket
							DPA		Renja	I	II	III	IV							DPA		Renja	
							8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=(13/8)* 100%										
1	2	3	4	5	6	7	K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	Rp(000)	18
4.1		3.30.3.30.3.31.0.00.01.00.06.2.01.01	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG					338.467,73		25,00%	83.168,86	22,00%	69.455,40	29,00%	105.208,90	24,00%	80.310,85	100,00%	338.144,01	100,00%	99,90%		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00%	99,90%			
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								37.218.617,55	33.395.750,35		5.956.453,11		8.952.447,44		8.162.627,85		12.107.326,95		35.178.855,34				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								9,34%	16,00%	20,99%	24,05%	28,42%	21,93%	41,15%	32,53%			99,90%	94,52%	105,34%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	2.22.08.2.08.03 PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	Terdapat sisa anggaran Belanja modal dikarenakan pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan, sehingga pembayaran hanya 80%
	3.30.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Terdapat sisa anggaran Belanja modal dikarenakan pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan, sehingga pembayaran hanya 80%
	3.30.01.2.01.02 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Terdapat sisa anggaran Belanja modal dikarenakan pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan, sehingga pembayaran hanya 80%
	3.30.01.2.01.03 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Terdapat sisa anggaran Belanja modal dikarenakan pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan, sehingga pembayaran hanya 80%
	3.30.01.2.01.04 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Terdapat sisa anggaran Belanja modal dikarenakan pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan, sehingga pembayaran hanya 80%
	3.30.01.2.01.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Terdapat sisa anggaran Belanja modal dikarenakan pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan, sehingga pembayaran hanya 80%
	3.30.01.2.01.07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.30.01.2.02.01 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.30.01.2.02.03 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.30.01.2.02.06 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.30.01.2.02.07 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.30.01.2.05.03 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.30.01.2.06.01 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.30.01.2.06.04 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.30.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal

3.30.01.2.06.08 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.01.2.06.10 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.01.2.06.11 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.01.2.08.03 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.01.2.09.02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.01.2.09.05 PEMELIHARAAN MEBEL	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.01.2.09.09 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.02.2.01.01 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.02.2.02.01 FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.02.2.06.03 PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA TERHADAP PENGGUNA AKHIR BAHAN BERBAHAYA (PA-B2) MAUPUN PRODUSEN B2 (P-B2)	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.03.2.01.01 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.03.2.01.02 FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.03.2.02.01 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.03.2.02.02 PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.04.2.02.01 PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.04.2.02.02 PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.04.2.03.03 PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.05.2.01.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PRODUK EKSPOR UNGGULAN KABUPATEN/KOTA	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.05.2.01.02 PAMERAN DAGANG NASIONAL	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.05.2.01.05 PENINGKATAN CITRA PRODUK EKSPOR	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.05.2.01.06 PEMBINAAN PELAKU USAHA EKSPOR	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.06.2.01.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.07.2.01.01 PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.07.2.01.02 PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.30.07.2.01.03 PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
3.31.02.2.01.02 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal

	3.31.02.2.01.03 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.31.02.2.01.05 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.31.03.2.01.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI DALAM LINGKUP IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.31.04.2.01.01 FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
	3.31.04.2.01.02 DISEMINASI, PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA MELALUI SIINAS	Tugas terdistribusi dengan baik kepada Tim, komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
Faktor penghambat pencapaian kinerja	3.30.01.2.01.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Terdapat sisa anggaran berupa anggaran PPN untuk pekerjaan penggandaan yang tidak terserap karena pembayaran dibawah ketentuan wajib PPN
	3.30.01.2.05.03 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Terdapat sisa anggaran berupa honor tenaga non ASN dikarenakan penganggaran setahun tetapi tidak semua ASN dikontrak mulai awal tahun
	3.30.01.2.06.10 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Terdapat sisa anggaran berupa honor tenaga non ASN dikarenakan penganggaran 6 bulan tetapi baru di kontrak 4 bulan terakhir
	3.30.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Terdapat anggaran backdrop yang dicadangkan untuk keperluan tugas lain yang diberikan pimpinan ke Dinas Perindag yang ternyata sampai akhir tahun tidak diperlukan
	3.30.01.2.09.02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Adanya PPKM sehingga banyak pengurangan kegiatan di luar, dan terdapat sisa anggaran cadangan pemeliharaan kendaraan
	3.30.01.2.09.09 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Terdapat sisa anggaran belanja sewa alat kerja yang ternyata kebutuhannya tidak sebanyak yang diperkirakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	3.30.03.2.01.01 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Terdapat sisa anggaran dari selisih harga kontrak dengan anggaran
	3.31.02.2.01.02 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	Terdapat anggaran penyusunan UKL/UPL yang tidak dapat direalisasikan karena kurang waktu dan harga penawaran yang bagi penyedia dirasa kurang, dan DED baru dibayarkan 80%, sesuai ketentuan dimana 20%nya baru dibayarkan setelah fisik pekerjaan diselesaikan
	3.30.01.2.01.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah
	3.30.01.2.05.03 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Sisa anggaran disetor kembali ke kas daerah, dan perencanaan untuk tahun selanjutnya agar lebih cermat lagi.
	3.30.01.2.06.10 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Sisa anggaran disetor kembali ke kas daerah, dan perencanaan untuk tahun selanjutnya agar lebih cermat lagi.
	3.30.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Sisa anggaran disetor kembali ke kas daerah, dan perencanaan untuk tahun selanjutnya agar lebih cermat lagi.
	3.30.01.2.09.02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Sisa anggaran disetor kembali ke kas daerah, dan perencanaan untuk tahun selanjutnya agar lebih cermat lagi.
	3.30.01.2.09.09 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Sisa anggaran disetor kembali ke kas daerah, dan perencanaan untuk tahun selanjutnya agar lebih cermat lagi.
	3.30.03.2.01.01 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Sisa anggaran disetor kembali ke kas daerah
	3.31.02.2.01.02 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	Sisa anggaran disetor kembali ke kas daerah, dan perencanaan untuk tahun selanjutnya agar lebih cermat lagi.

*) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya



Adapun capaian Renstra di Tahun 2021, ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 2.1.2

Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran		Indikator Sasaran		Cara/Rumus Penghitungan Indikator Sasaran	Tahun 2021		Tingkat Capaian	Predkat
					Target	Realisasi		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah *)	1	Predikat AKIP	Predikat AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas penilaian dari Inspektorat Kab	A (84,50)	AA (94,46)	111,79%	Sangat berhasil
2	Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	1	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Standar defiasi dibagi rata-rata harga per tahun dikali 100	≤ 5%	3.83%	123,40%	Sangat berhasil
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	(pelaku usaha yang memiliki dokumen perijinan + pedagang pasar Kabupaten yang memiliki SPTD) dibagi (jumlah pelaku usaha perdagangan dan jumlah tempat dasaran tetap di pasar kabupaten) dikalikan 100%	74,93%	75,46%	100,71%	Sangat berhasil
4	Meningkatnya daya saing ekspor	1	Nilai Ekspor Kabupaten Sleman	Nilai total seluruh ekspor komoditas pada tahun bersangkutan	43.700.000 US\$	77.887.264,63 US\$	178,23%	Sangat berhasil
		2	Jumlah pelaku usaha perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan	10.330 pelaku usaha	11.370 pelaku usaha	110,07%	Sangat berhasil

Sasaran		Indikator Sasaran		Cara/Rumus Penghitungan Indikator Sasaran	Tahun 2021		Tingkat Capaian	Predkat
					Target	Realisasi		
			yang mendapat fasilitas pemasaran	fasilitas pemasaran pada tahun bersangkutan				
5	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana perdagangan Tradisional	1	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik	Jumlah pasar dan sarana usaha milik kabupaten dikelola dengan baik dibagi jumlah seluruh pasar dan sarana usaha milik kabupaten dikalikan 100%	9,30%	12,5%	134,41%	Sangat berhasil
6	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi industri	1	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	nilai produksi tahun n dikurangi nilai produksi tahun n-1 dibagi nilai produksi tahun n-1 dikali 100	2%	2,1%	105%	Sangat berhasil

*) menggunakan target 2021 dan realisasi 2020 dikarenakan belum ada hasil penilaian tahun 2021

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.24 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- Sub Bagian Keuangan; dan
 - Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
- Kelompok Substansi Pengembangan Produksi Industri;
 - Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Industri; dan
 - Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian Industri.
- d. Bidang Usaha Perdagangan, terdiri dari:
- Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Perdagangan;
 - Kelompok Substansi Distribusi dan Pemasaran; dan
 - Kelompok Substansi Pengawasan Usaha Perdagangan
- e. Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional, terdiri dari:
- Kelompok Substansi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional;
 - Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional; dan
 - Kelompok Substansi Retribusi Perdagangan Tradisional.
- f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional, terdiri dari:
- Kelompok Substansi Pembinaan Perdagangan Tradisional;
 - Kelompok Substansi Pengembangan Perdagangan Tradisional; dan
 - Kelompok Substansi Penataan Perdagangan Tradisional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

1. pembinaan dan pengembangan produksi,
2. pengembangan usaha industri,
3. pengawasan dan pengendalian industri,
4. pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan,
5. pemantauan distribusi dan pemasaran produk,
6. pengawasan usaha perdagangan
7. pengelolaan keamanan perdagangan tradisional,
8. pengelolaan kebersihan petdagangan tradisional,
9. pengelolaan bangunan perdagangan tradisional,
10. pengelolaan retribusi perdagangan tradisional
11. pelayanan Surat Pemanfaatan Tempat Dasar
12. pembinaan perdagangan tradisional,
13. pengembangan perdagangan tradisional,
14. penataan, dan pengendalian perdagangan tradisional

Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.2
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten Sleman Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Catatan Analisis	
				Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	82,75	83,13	adanya komitmen, baik dari pimpinan maupun petugas untuk berusaha	keterbatasan jumlah petugas yang menyebabkan beberapa

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Catatan Analisis	
				Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Perangkat Daerah (indeks)			memberikan pelayanan yang prima kepada para stakeholder.	petugas di lapangan mendapatkan ketugasan tambahan selain ketugasan pokoknya
2	Predikat AKIP *) (predikat)	A (84,5)	AA (94,46)	Komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan Komitmen untuk memberikan laporan-laporan yang akuntabel	keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mengakibatkan pelaporan-pelaporan baik dari sumber data maupun pengolahan data menjadi kurang cepat
3	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (%)	≤ 5%	3,83	Koordinasi yang baik antar perangkat daerah teknis, baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi yang mengawal pengawasan ketersediaan barang kebutuhan pokok	variasi harga barang kebutuhan pokok sangat tergantung pada tingkat ketersediaan yang seringkali tidak hanya melibatkan antar Kabupaten, akan tetapi bahkan antar provinsi
4	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki izin usaha (%)	74,93	75,46	tumbuhnya kesadaran pada pelaku usaha perdagangan disamping intensnya upaya petugas untuk melakukan penertiban perijinan usaha perdagangan	keterbatasan jumlah petugas pada Kelompok Substansi yang mengampu
5	Nilai ekspor Kabupaten	43.700.000	77.887.264,63	mulai terbukanya pasar ekspor	para pelaku usaha ekspor

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Catatan Analisis	
				Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Sleman (US \$)			semenjak pandemic covid-19, terutama pasar Amerika Serikat, komitmen pelaku usaha untuk mempertahankan daya saing produk, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi harga produk	menghadapi sulitnya dan mahalanya container
6	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik (%)	9,3	12,5	komitmen pimpinan sampai dengan petugas di lapangan untuk mengelola pasar kabupaten dengan optimal, tersedianya armada truck sampah yang berada di bawah pengelolaan secara langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ketersediaan informasi tahunan terkait hasil monev kondisi sarana dan prasarana pasar kabupaten	Pengelolaan pasar kabupaten seringkali dihadapkan pada permasalahan pembuangan sampah dari luar pasar, beberapa pasar berada pada daerah yang rawan akan bencana alam (angin topan) sehingga sangat beresiko mengalami kerusakan bangunan
7	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri (%)	2	2,1	Ketersediaan tenaga kerja, Ketersediaan bahan baku potensi lokal, Banyaknya peluang pembinaan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga non pemerintah, Banyaknya	kondisi pandemic covid-19 yang belum benar-benar pulih

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Catatan Analisis	
				Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
				peluang peningkatan kapasitas pelaku usaha industri	

*) menggunakan target 2021 dan realisasi 2020 dikarenakan belum ada hasil penilaian tahun 2021

2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Menurunnya perkembangan dan produktifitas sentra industri
2. Rendahnya kompetensi teknis IKM eksisting
3. Rendahnya literasi dan kapabilitas IKM dalam memanfaatkan teknologi dan sistem informasi di era digitalisasi
4. Perlunya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri
5. Perlunya pengembangan zona aneka industri
6. Perlunya pemulihan segera IKM terdampak Covid
7. Pengendalian harga dan informasi “supply-chain” bahan pokok belum optimal
8. Regulasi pergudangan sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
9. Kondisi dan kinerja toko tradisional semakin menurun
10. Pengembangan pasar ber-SNI dibutuhkan oleh masyarakat
11. Literasi pedagang pasar akan platform online dan digital masih sangat rendah
12. Sampah pasar perlu dikelola dan dipilah dengan lebih baik
13. Konsep dari revitalisasi pasar masih perlu penyempurnaan menyesuaikan kearifan lokal dan cakupan pedagang
14. Cakupan dan kualitas program Tertib Ukur masih perlu ditingkatkan



BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran
Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	83	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Predikat AKIP	AA (85)
2	Memantapkan daya saing sektor perdagangan	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	≤ 5%	Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	≤ 5%
		Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	74,69%	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki izin usaha	74,69%
		Nilai ekspor	48.848.000 US\$	Meningkatnya daya saing ekspor	Nilai Ekspor Kabupaten Sleman	48.848.000 US\$
					Jumlah pelaku usaha perdagangan yang mendapat fasilitas pemasaran	10.630 pelaku usaha
		Persentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik	13,95%	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana perdagangan Tradisional	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dikelola dengan baik	13,95%
3	Memantapkan daya saing sektor industri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	2,3%	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi industri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	2,3%

3.2. USULAN INOVASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Usulan inovasi yang akan dilaksanakan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Rencana Inovasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2023

I. SIPARA

No	Data	Penjelasan
1	Asal Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Nama Inovasi Daerah	SIPARA (Sistem Informasi Pasar Rakyat)
3	Penjelasan Singkat	Sistem Informasi Pasar Rakyat akan mensinergikan data pembayaran retribusi dengan data perizinan/Surat Pemanfaatan Tempat Dasaran.
4	Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang dibentuk	Sistem ini akan menyimpan data ketetapan pembayaran retribusi per pedagang pasar rakyat, menyimpan data pembayaran retribusi yang dibayarkan pedagang pasar rakyat, menampilkan data tunggakan yang harus dibayarkan oleh pedagang. Selain itu, system ini juga menyimpan data perizinan/Surat Pemanfaatan Tempat Dasaran per pedagang. Sistem akan memberikan informasi ketika SPTD yang dimiliki pedagang perlu diperpanjang. Sistem ini akan mensinkronkan data SPTD yang dibutuhkan untuk penghitungan ketetapan retribusi per pedagang, sekaligus menginformasikan apakah pedagang memiliki tanggungan tunggakan sebagai bahan pertimbangan diperbolehkannya pemrosesan izin
5	Bentuk inovasi daerah	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
6	Jenis inovasi daerah	Inovasi digital
7	Inisiator inovasi	Perangkat Daerah
8	Tahapan Inovasi	Tahap I. Inisiatif
9	Status saat ini a. Kode status b. Persentase selesai	Rencana pembangunan/implementasi dalam pembuatan 5%

No	Data	Penjelasan
	c. Penjelasan	Inovasi SIPARA masih pada tahapan rencana pembangunan/implementasi dalam pembuatan yang akan dimintakan penganggarannya di tahun 2023. Kebutuhan penganggaran sebesar Rp.90.000.000 Persentase selesai sebesar 5%, berupa gagasan apa saja yang harus disediakan dalam sistem
10	Penetapan inovasi	Belum ada Keputusan penetapan inovasi (baru akan di SK kan apabila dikabulkan penganggarannya)
11	Tujuan dari inovasi	Menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan pasar rakyat, terutama informasi retribusi dan informasi perizinan pedagang pasar rakyat/SPTD
12	Manfaat dari inovasi	1. Efisiensi waktu dalam penghitungan tunggakan pedagang 2. Efisiensi waktu dalam pemrosesan SPTD 3. Petugas dapat lebih efektif bekerja dimana informasi retribusi dan informasi perizinan tersedia dalam satu system terintegrasi
13	Keunikan/kreativitas	Inovasi SIPARA menjadi salah satu bentuk penerapan manajemen resiko pelayanan pada Kelompok Substansi Retribusi Perdagangan Tradisional. Dengan adanya system ini informasi kekurangan pembayaran retribusi bisa didapatkan lebih cepat, dapat dilakukan upaya-upaya penagihan sehingga resiko besarnya tunggakan pembayaran retribusi dapat dicegah. Selain itu, resiko keterlambatan pemrosesan izin/SPTD dapat dicegah dengan adanya informasi masa berlaku SPTD masing-masing pedagang.
14	Kemitraan dengan PD/instansi/pihak lain	- Bank (BPD dan Bank Sleman) selaku bank mitra dalam pembayaran retribusi. Data transaksi pembayaran retribusi perlu disinergikan agar bisa diakses secara langsung melalui SIPARA - Dinas Kominfo selaku pengolah data tagihan dan

No	Data	Penjelasan
		yang melakukan updating data pedagang - BKAD selaku Perangkat Daerah yang membawahi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman - UPTD Pelayanan Pasar selaku pengelola teknis perizinan pedagang pasar rakyat/SPTD
15	Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Sistem ini dapat dikembangkan tidak hanya untuk kepentingan Kelompok Substansi Retribusi Perdagangan Tradisional. Sistem ini dapat dikembangkan dengan memasukkan data penguatan modal yang diakses pedagang pasar dari UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal BKAD. Informasi besarnya penguatan modal yang diperoleh dan besarnya pembayaran akan membantu Kelompok Substansi Pembinaan Perdagangan Tradisional dalam memberikan pendampingan penguatan modal. Selain itu, data-data ketertiban pedagang pasar rakyat terkait retribusi, SPTD dan ketertiban pembayaran angsuran penguatan modal akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat diperlukan dalam proses penataan pedagang oleh Kelompok Substansi Penataan Perdagangan Tradisional
16	Strategi menjaga keberlangsungan	1. Sosialisasi internal khususnya kepada petugas yang akan dijadikan admin sistem 2. Koordinasi dengan mitra (BPD, Bank Sleman, Dinas Kominfo, BKAD, Kelompok Substansi terkait, UPTD Pelayanan Pasar) untuk mereview penerapan 3. Monitoring dan evaluasi secara berkala
17	Sumber Daya yang digunakan	1. SDM : a) seluruh SDM yang terlibat dalam kegiatan Kelompok Substansi Retribusi Perdagangan Tradisional untuk menginisiasi, melaksanakan, dan mengevaluasi pemanfaatan SIPARA; b) SDM yang berperan sebagai admin;

No	Data	Penjelasan
		c) Pimpinan selaku penentu kebijakan dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan SIPARA 2. Peralatan/perlengkapan : endidik serta perangkat pendukung, jaringan internet 3. Anggaran : tunjangan tenaga operasional, pembangunan sistem, pengembangan aplikasi untuk target jangka panjang
18	Anggaran Inovasi (jika ada)	Rp.50.000.000,00
19	Analisis Resiko	Faktor pendukung keberhasilan: - Data-data awal yang dibutuhkan untuk pembangunan sistem tersedia - Komitmen pimpinan - Tersedia banyak pilihan penyedia jasa pengembangan sistem Kendala: - Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah (Tingkat endidikan; kompetensi & keahlian; dll). - Kelancaran jaringan internet - Keterbatasan APBD dalam penyediaan perangkat lunak
20	Replikasi	Memiliki potensi untuk direplikasi pada daerah lain
21	Hasil Inovasi	Dengan adanya SIPARA akan memberikan efisiensi dan efektivitas, khususnya pada Kelompok Substansi Retribusi Perdagangan Tradisional dan UPTD Pelayanan Pasar, dalam memberikan pelayanan retribusi dan pelayanan perizinan pedagang pasar rakyat/SPTD
22	Video inovasi	Belum tersedia

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Urusan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan
Tahun 2023

No				Uraian	Jumlah	Pendanaan	Keterangan
1				Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	33.509.865.320	APBD	Dinas Perindag, UPTD Pelayanan Pasar, UPTD Pelayanan Metrologi Legal
	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.446.576.288.	APBD	Dinas Perindag
		1		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.156.650	APBD	Dinas Perindag
			1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.238.750	APBD	Dinas Perindag
			2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.956.250	APBD	Dinas Perindag
			3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.928.750	APBD	Dinas Perindag
			4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.370.750	APBD	Dinas Perindag
			5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.377.325	APBD	Dinas Perindag
			6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.284.825	APBD	Dinas Perindag
		2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.654.826.554	APBD	Dinas Perindag
			7	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.200.172.679	APBD	Dinas Perindag
			8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	440.841.400	APBD	Dinas Perindag
			9	Sub Kegiatan	1.761.700	APBD	Dinas Perindag

No				Uraian	Jumlah	Pendanaan	Keterangan
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
			10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.050.775	APBD	Dinas Perindag
		3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.440.758.200	APBD	Dinas Perindag
			11	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.440.758.200	APBD	Dinas Perindag
		4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.028.888	APBD	Dinas Perindag
			12	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.619.190	APBD	Dinas Perindag
			13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.314.933	APBD	Dinas Perindag
			14	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.224.225	APBD	Dinas Perindag
			15	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	25.500.000	APBD	Dinas Perindag
			16	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.688.000	APBD	Dinas Perindag
			17	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.180.965	APBD	Dinas Perindag
			18	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.501.175	APBD	Dinas Perindag
		5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.313.672.744	APBD	Dinas Perindag
			19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.560.000	APBD	Dinas Perindag
			20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	960.000.000	APBD	Dinas Perindag
			21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	137.050.000	APBD	Dinas Perindag

No				Uraian	Jumlah	Pendanaan	Keterangan
				Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.193.062.744	APBD	Dinas Perindag
		6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.133.252	APBD	Dinas Perindag
			23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	490.020.052	APBD	Dinas Perindag
			24	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	20.500.000	APBD	Dinas Perindag
			25	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.613.200	APBD	Dinas Perindag
	2			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	357.500.440	APBD	Dinas Perindag
		7		Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	109.664.440	APBD	Dinas Perindag
			26	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	109.664.440	APBD	Dinas Perindag
		8		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	151.080.000	APBD	Dinas Perindag
			27	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	151.080.000	APBD	Dinas Perindag
		9		Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	96.756.000	APBD	Dinas Perindag
			28	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi,	96.756.000	APBD	Dinas Perindag

No				Uraian	Jumlah	Pendanaan	Keterangan
				Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P B2)			
	3			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.451.194.129	APBD	Dinas Perindag
		10		Kegiatan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.499.165.887	APBD	Dinas Perindag
			29	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.941.080.525	APBD	Dinas Perindag
			30	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.558.085.362	APBD	Dinas Perindag
		11		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	952.028.242	APBD	Dinas Perindag
			31	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	585.000.000	APBD	Dinas Perindag
			32	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	367.028.242	APBD	Dinas Perindag
	4			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	235.064.500	APBD	Dinas Perindag
		12		Kegiatan Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	221.559.500	APBD	Dinas Perindag
			33	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	68.913.000	APBD	Dinas Perindag
			34	Sub Kegiatan Pemantauan Harga	152.646.500	APBD	UPTD Pelayanan Metrologi Legal

No				Uraian	Jumlah	Pendanaan	Keterangan
				dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
		13		Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.505.000	APBD	UPTD Pelayanan Metrologi Legal
			35	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	13.505.000	APBD	UPTD Pelayanan Metrologi Legal
	5			Program Pengembangan Ekspor	740.376.300	APBD	Dinas Perindag
		14		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	740.376.300	APBD	Dinas Perindag
			36	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	47.271.500	APBD	Dinas Perindag
			37	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	415.125.750	APBD	Dinas Perindag
			38	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	119.065.375	APBD	Dinas Perindag
			39	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	158.913.675	APBD	Dinas Perindag
	6			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	582.859.963	APBD	Dinas Perindag
		15		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	582.859.963	APBD	Dinas Perindag
			40	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	582.859.963	APBD	Dinas Perindag
	7			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.696.293.700	APBD	Dinas Perindag
		16		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	2.696.293.700	APBD	Dinas Perindag

No				Uraian	Jumlah	Pendanaan	Keterangan
				Dalam Negeri			
			41	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	787.559.850	APBD	Dinas Perindag
			42	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.438.489.850	APBD	Dinas Perindag
			43	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	470.244.000	APBD	Dinas Perindag
2				Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	1.993.824.584	APBD	Dinas Perindag
	8			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.742.101.811	APBD	Dinas Perindag
		17		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.742.101.811	APBD	Dinas Perindag
			44	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	257.246.100	APBD	Dinas Perindag
			45	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	648.184.511	APBD	Dinas Perindag
			46	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	836.671.200	APBD	Dinas Perindag
	9			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	170.000.000	APBD	Dinas Perindag
		18		Kegiatan Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	170.000.000	APBD	Dinas Perindag

No				Uraian	Jumlah	Pendanaan	Keterangan
			47	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	170.000.000	APBD	Dinas Perindag
	10			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	81.722.773	APBD	Dinas Perindag
		19		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	81.722.773	APBD	Dinas Perindag
			48	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	81.722.773	APBD	Dinas Perindag
TOTAL					35.503.689.904	APBD	



BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						31,723,918,372					39,963,450,955		
3	30	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						23,446,576,288					25,803,857,169		
3	30	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34,156,650					37,572,700		
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen		8,238,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,062,625		
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen		2,956,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,251,875		
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen		2,928,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,221,625		
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen		3,370,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,707,825		
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen		2,377,325	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,615,250		
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				23 dokumen		14,284,825	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,713,500		
3	30	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15,654,826,554					17,220,564,639		
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				150 orang/bulan		15,200,172,679	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,720,189,946		
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 dokumen		440,841,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			485,180,685		
3	30	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan				2 dokumen		1,761,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,938,156		
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				41 laporan		12,050,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,255,852		
3	30	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2,440,758,200					2,684,838,599		
3	30	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian				1 dokumen		2,440,758,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,684,838,599		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							382,028,888				447,212,043		
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket		22,619,190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,882,694	
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				4 paket		161,314,933	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			204,425,400	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket		6,224,625	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,847,087	
3	30	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 laporan		25,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,050,000	
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 dokumen		128,688,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			141,556,800	
3	30	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis				1 dokumen		28,180,965	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,999,062	
3	30	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 dokumen		9,501,175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,451,000	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,313,672,744				4,737,379,068		
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 dokumen		23,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,505,050	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 dokumen		960,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,047,750,000	
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 laporan		137,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,755,000	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 laporan		3,193,062,744	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,512,369,018	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							621,133,252				676,290,120		
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 unit		490,020,052	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			532,065,600	
3	30	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 unit		20,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,550,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit		110,613,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			121,674,520	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							357,500,440				472,887,187		
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							109,664,440				150,755,000		
3					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				2400 Dokumen		109,664,440				150,755,000	
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang							151,080,000				209,098,175		
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen		151,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			209,098,175	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							96,756,000				113,034,012		
3					Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan		96,756,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			113,034,012	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							4,248,107,144				8,212,355,001		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							3,296,078,902				6,912,355,001		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				25 Pasar		1,941,080,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,912,355,000	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				35 Unit		1,354,998,377				1	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							952,028,242				1,300,000,000		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen		585,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750,000,000	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen		367,028,242	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			550,000,000	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							235,064,500				468,456,685		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							221,559,500				449,949,735		
3					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan		68,913,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,132,285	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan		152,646,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			372,817,450	
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan		13,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,506,950	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							740,376,300	1,047,346,413					
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							740,376,300	1,047,346,413					
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				35 Pelaku Usaha		47,271,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,800,000	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Pelaku Usaha		415,125,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			688,769,500	
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				4 Produk		119,065,375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,971,913	
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina				50 Pelaku Usaha		158,913,675				174,805,000	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							2,696,293,700	3,958,548,500					
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							2,696,293,700	3,958,548,500					
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				40 UMKM		787,559,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,575,119,700	
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				300 UMKM		1,438,489,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,256,660,400	
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				1 Dokumen		470,244,000				126,768,400	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1,993,824,584	1,288,238,300					
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							1,742,101,811	1,077,738,300					
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							1,742,101,811	1,077,738,300					
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								0	Lain-lain PAD Yang Sah			0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen		257,246,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen		648,184,511	Lain-lain PAD Yang Sah			1,000,000,000	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen		836,671,200	Lain-lain PAD Yang Sah			77,738,300	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							170,000,000			0			
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							170,000,000			0			
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen		170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							81,722,773			210,500,000			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							81,722,773			210,500,000			
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen		81,722,773	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			210,500,000	
TOTAL													33,717,742,956			41,251,689,255		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0001 UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							150,053,615			165,000,000			
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							150,053,615			165,000,000			
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							150,053,615			165,000,000			
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			6 Unit		150,053,615	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			165,000,000		
TOTAL												150,053,615			165,000,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0002 UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							233,408,490			233,411,125			
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							233,408,490			233,411,125			
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							233,408,490			233,411,125			
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				9 Unit		233,408,490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		233,411,125		
TOTAL													233,408,490			233,411,125		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0003 UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							236,851,243	260,536,360					
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							236,851,243	260,536,360					
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							236,851,243	260,536,360					
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit		236,851,243				260,536,360	
TOTAL												236,851,243	260,536,360					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0004 UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH IV

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							288,672,470			309,086,925			
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							288,672,470			309,086,925			
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							288,672,470			309,086,925			
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			7 Unit		288,672,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			309,086,925		
TOTAL												288,672,470			309,086,925			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0005 UPTD PELAYANAN PASAR WILAYAH V

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							294,101,167	323,511,283					
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							294,101,167	323,511,283					
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							294,101,167	323,511,283					
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan				6 unit		294,101,167				323,511,283	
TOTAL												294,101,167	323,511,283					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0006 UPTD PELAYANAN METROLOGI LEGAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								582,859,963	641,145,959				
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								582,859,963	641,145,959				
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								582,859,963	641,145,959				
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, ALat Takar, ALat Timbang, dan Alat perlengkapan ditera ulang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5000 unit		582,859,963	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			641,145,959	
TOTAL													582,859,963	641,145,959				



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Perangkat Daerah.
2. Penjabaran lebih lanjut Renja PD Tahun 2023 dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.
3. Renja PD tahun 2023 harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
4. Renja PD Tahun 2023 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja
5. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target kegiatan/sub kegiatan, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam Renja PD, maka akan dilakukan perubahan melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 merupakan bagian penting dalam rangka pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023, serta menjadi acuan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah di Tahun 2023 sebagai bagian langkah untuk memenuhi sasaran pembangunan tahun 2023.

Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan dihadapkan pada beberapa tantangan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca terpuruk akibat pandemi Covid-19. Untuk itu diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan upaya bersama semua pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sleman.

BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2023
Kabupaten Sleman

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten	√			
5	Penentuan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan forum SKPD kabupaten	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing – masing SKPD kabupaten sesuai surat edaran bupati	√			
11	Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing – masing SKPD kabupaten telah menyusun dan mempertimbangkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja SKPD kabupaten yang telah disyahkan	√			

Sleman, 28 Juli 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sleman

Dra. RR. Mae Rusmi S., M.T
NIP. 19660529 19903 2 004